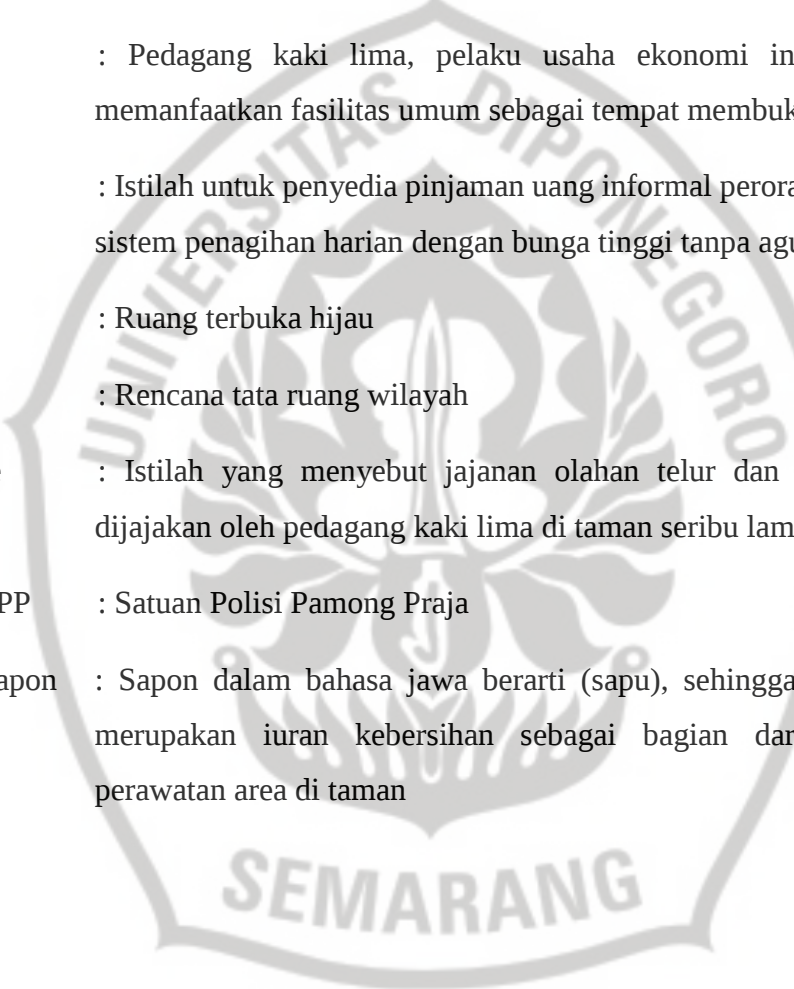


DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH



Hak lapak	: Klaim tidak tertulis yang dimiliki pedagang untuk menempati titik lokasi berjualan di dalam taman seribu lampu
K3	: Ketertiban, kebersihan, dan keindahan
Perda	: Peraturan Daerah, hukum tingkat daerah yang menjadi landasan regulasi di Kabupaten Blora
PKL	: Pedagang kaki lima, pelaku usaha ekonomi informal yang memanfaatkan fasilitas umum sebagai tempat membuka usaha
Plecit	: Istilah untuk penyedia pinjaman uang informal perorangan dengan sistem penagihan harian dengan bunga tinggi tanpa agunan formal.
RTH	: Ruang terbuka hijau
RTRW	: Rencana tata ruang wilayah
Salome	: Istilah yang menyebut jajanan olahan telur dan tepung yang diajakan oleh pedagang kaki lima di taman seribu lampu
Satpol PP	: Satuan Polisi Pamong Praja
Uang sapon	: Sapon dalam bahasa jawa berarti (sapu), sehingga uang sapon merupakan iuran kebersihan sebagai bagian dari kompromi perawatan area di taman

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ruang terbuka hijau publik adalah tempat terbuka yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat secara umum (Fitriyah & Purwanto, 2020: 303). Ruang terbuka hijau atau RTH juga menjadi penunjang penting dalam perencanaan tata kota yang keberadaannya diatur melalui peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Secara resminya ruang terbuka hijau ini didefinisikan sebagai area yang memanjang dan/atau mengelompok, yang penggunaannya bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam¹.

Salah satu bentuk ruang terbuka hijau yang sering banyak ditemukan adalah taman kota. Pada umumnya, taman kota menjadi tempat berkumpul untuk semua orang untuk sekedar mengobrol atau menikmati keindahan alam, sarana rekreasi, hingga fungsi arsitektural sebagai landmark kota. Taman kota merupakan salah satu unsur penyusun ruang kota yang dibutuhkan oleh masyarakat. Menurut Marhadi & Hadrah (2020: 14) taman kota merupakan ruang di dalam kota yang ditata untuk menimbulkan keindahan, kenyamanan, dan kesehatan bagi penggunanya. Keberadaan taman kota cukup penting karena bisa membentuk citra kota melalui aktivitas yang ada di dalamnya. Selain itu, fungsi utama dari taman kota biasanya menjadi tempat ruang terbuka (*open spaces*) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan vegetasi yang mampu meningkatkan kualitas air tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi, dan pengatur iklim makro. Sebagai ruang terbuka, taman kota dipahami sebagai ruang yang mengandung unsur alam dan pemandangan yang dimunculkan oleh keberagaman vegetasi, aktivitas, dan unsur buatan yang disediakan sebagai fasilitas sosial, rekreasi, dan sumber respirasi perkotaan (Achmad et.al, 2024: 141).

¹ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2012 Tahun 2012

Ruang terbuka hijau dapat dibagi menjadi dua jenis berdasarkan kepemilikannya yakni ruang terbuka hijau privat dan ruang terbuka hijau publik. Taman kota ini termasuk golongan ruang terbuka hijau publik. Ruang publik sendiri dengan sederhana merupakan suatu ruang yang berfungsi untuk masyarakat berkegiatan yang berkaitan dengan sosial, ekonomi, dan budaya. Ruang publik adalah tempat yang memperlihatkan sebuah objek dimana dapat diakses secara fisik maupun visual oleh masyarakat umum (Marhadi & Hadrah, 2020: 13). Oleh dari itu, taman kota sebagai ruang publik adalah memaksimalkan fungsi sosial dan estetika dari lahan terbuka hijau di antara bangunan yang berisi tanaman dan vegetasi hijau sebagai sarana kegiatan pada tingkat kota yang bisa diakses oleh siapa saja.

Salah satunya adalah taman kota di wilayah Kabupaten Blora yakni Taman Seribu Lampu. Pemerintah Kabupaten Blora berusaha memenuhi ruang terbuka hijau di seluruh Kabupaten Blora dengan menghadirkan fasilitas umum yang meningkatkan kualitas lingkungan dan memberikan manfaat keindahan, sosial dan ekonomi bagi area Kecamatan Cepu. Ketersediaan ruang terbuka hijau ini dapat meningkatkan kualitas lingkungan (keindahan dan kenyamanan), mengurangi polusi, dan meningkatkan kesehatan masyarakat serta memastikan harmonisasi lingkungan (harahap, 2021: 18). Jika melihat Taman Seribu Lampu yang sudah mengalami revitalisasi pada tahun 2017 lalu justru membuatnya menjadi simbol dan ikonisnya Kecamatan Cepu hingga saat ini (Andrea & Raidi, 2022: 347).

Namun pada aslinya, ruang-ruang terbuka ini sering mengalami pergeseran fungsi yang tidak lagi hanya menjadi ruang rekreasi kota melainkan juga menjadi tempat aktivitas ekonomi informal yang dimanfaatkan oleh beberapa masyarakat perkotaan sebagai sumber penghidupan. Fenomena ini banyak dijumpai di berbagai kota di Indonesia, dimana taman kota, trotoar, dan ruang terbuka hijau lainnya menjadi lokasi berjualan bagi para pedagang kaki lima yang tidak punya akses terhadap ruang ekonomi formal. Salah satu contohnya adalah Taman Seribu Lampu sebagai ruang terbuka hijau Kecamatan Cepu juga dimanfaatkan oleh pedagang kaki lima dalam memenuhi penghasilan ekonomi rumah tangga keluarga. Taman Seribu Lampu merupakan salah satu tempat yang banyak diminati oleh para pedagang kaki lima dengan tujuan untuk memenuhi perekonomian. Hal tersebut

dipengaruhi oleh letak taman sebagai ruang terbuka hijau menjadi lokasi yang banyak pengunjung sehingga membuat para pedagang kaki lima bersemangat untuk memanfaatkannya (Daniswari, 2023).

Keterikatan ruang publik dan dinamika ekonomi informal ini tercerminkan di Taman Seribu Lampu Kecamatan Cepu. Berdasarkan arsip surat kabar *De Locomotief* yang dikutip dalam tulisan pemerhati sejarah dan budaya Temmy Setiawan (2026) secara administratif, cepu hanya wilayah yang berstatus kecamatan. Tetapi secara sejarahnya dan realitas sosial ekonomi, Cepu memiliki alur berkembangnya menjadi kota mandiri. Wilayah yang berada di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur dan tumbuh sebagai pusat sejarah industri minyak dan kereta api sejak era kolonial Belanda, Cepu berkembang menjadi pusat ekonomi jauh dinamis dibandingkan Kabupatennya sendiri. Identitas historis inilah yang jelas-jelas pada keberadaan Taman Seribu Lampu yang membentang di sepanjang jalan utama kecamatan Cepu. Setelah revitalisasi, taman ini dirancang untuk memperkenalkan citra kecamatan cepu sebagai “kota minyak” melalui pembuatan tugu-tugu simbolik seperti tugu kereta uap dan monumen pompa angguk. Namun, dibalik fungsi keindahan dan pelestarian kolektif kota, Taman Seribu Lampu menjelma menjadi ruang publik yang memicu daya tarik ekonomi bagi masyarakat sekitar terutama bagi para pedagang kaki lima.

Pedagang kaki lima merupakan bagian dari sektor ekonomi informal yang muncul dari adanya keterbatasan lapangan pekerjaan formal². Pedagang kaki lima atau disingkat PKL merupakan istilah untuk menyebut penaja dagangan yang melakukan kegiatan komersial di atas wilayah jalan (trotoar) yang seharusnya diperuntukkan bagi pejalan kaki (pedestrian). Masih mengutip dari berita yang dinarasikan oleh Anam (2023) sebenarnya keberadaan pedagang kaki lima dapat meningkatkan penghasilan ekonomi keluarga mereka dan meningkatkan daya beli masyarakat dengan menjual barang harga yang lebih murah. Di lain sisi, mereka para pedagang kaki lima juga sering dipandang negatif bagi sebagian masyarakat bahkan pemerintah. Hal tersebut didukung lewat argumen dari (Permana et al., 2023: 738) bahwa pemerintah bersikap negatif karena memandang pedagang kaki

² Anam, C. (2023). *Pedagang Kaki Lima: Pendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentas Kemiskinan*. Kumparan.com

lima sebagai gangguan yang membuat kota menjadi tidak rapi, mengganggu ketertiban lalu lintas, membuang sampah dagangan ke sembarang tempat, gangguan pejalan kaki, membayar pajak, serta kemungkinan penyebaran penyakit lewat penjualan makanannya di pinggir jalan raya.

Taman Seribu Lampu memicu masalah tata ruang dan cara pengelolaannya yang rumit. Di satu sisi pada zona taman lima dan taman enam merupakan ruang terbuka hijau murni, simbol-simbol dari ornamen kota minyak yang masih terjaga dan terawat serta steril dari aktivitas ekonomi. Namun disisi lain, pada zona taman satu sampai taman empat terjadi perubahan ruang secara terus menerus dimana para pedagang kaki lima membuka lapak-lapak usaha informalnya setiap hari. Kemunculan pedagang kaki lima ini menciptakan degradasi fisik fasilitas taman seperti bangku-bangku taman yang rusak, akses jalan yang berlubang, hingga beberapa gerobak yang ditinggalkan. Keberadaan pedagang kaki lima di Taman Seribu Lampu tidak bisa disimpulkan hanya sebagai ‘kegagalan penataan kota’, banyak dari pedagang kaki lima yang dahulunya bekerja di sektor formal secara sadar memilih beralih ke sektor informal demi mendapatkan otonomi kerja dan fleksibilitas dalam bekerja. Mereka menghadapi ketidakpastian struktural selama menjadi pedagang kaki lima tanpa adanya regulasi daerah yang mengatur penataan pedagang kaki lima dengan spesifik.

Menilik kegiatan ekonomi pedagang kaki lima di Taman Seribu Lampu tidak terlepas dari banyaknya tantangan hingga kondisi infrastruktur taman yang berbeda antara satu zona dengan zona lainnya. Masih dikelilingi berbagai tantangan itu, para pedagang kaki lima tidak serta merta meninggalkan aktivitas dagangnya. Sebaliknya, mereka tanggap mengembangkan strategi untuk tetap bertahan dan mempertahankan keberlangsungan usaha mereka di ruang publik yang tidak sepenuhnya berpihak pada mereka. Situasi inilah yang menjadikan pedagang kaki lima di Taman Seribu Lampu menjadi fenomena menarik yang dikaji lebih dalam sebagai jawaban dari bagaimana kelompok ekonomi marjinal merespons ketidakpastian struktural bukan dengan pasrah melainkan dengan beradaptasi yang dilakukan terus menerus.

Pandangan Keith Hart tentang aktivitas ekonomi informal di dalam esainya yang berjudul “*Income Opportunities and Urban Employment in Ghana*” (1973),

Hart menegaskan bahwa sektor informal dipahami sebagai cara bertahan hidup diantara masyarakat urban yang terpinggirkan sekaligus menjadi faktor yang membuat mereka makin terasing dari kehidupan sosial dan ekonomi utama. Secara tidak langsung Keith Hart berpendapat bahwa sektor informal dapat mengurangi pengangguran di negara-negara yang sedang berkembang bahkan beberapa ahli pembangunan di negara berkembang memandang sektor informal sebagai strategi alternatif solusi dari masalah keterbatasan peluang kerja. Negara maju maupun negara berkembang pada penelitian ini, fenomena ini direpresentasikan oleh pedagang kaki lima sebagai aktor ekonomi informal yang memanfaatkan ruang publik sebagai lapak untuk memenuhi sumber penghasilan mereka.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pedagang kaki lima di Taman Seribu Lampu menghadapi berbagai bentuk ketidakpastian, mulai dari persaingan antar pedagang, tekanan kebijakan dari otoritas terkait penertiban dan penataan ruang, hingga tantangan adaptasi pada perubahan ekonomi yang terus berkembang. Untuk menghadapi situasi itu, para pedagang tidak berdiam diri saja. Mereka aktif membuat strategi untuk mempertahankan keberlangsungan usahanya baik melalui negosiasi dengan sesama pedagang dan otoritas, maupun pengembangan jaringan sosial dan ekonomi yang memungkinkan mereka tetap membuka usaha di ruang yang tidak sepenuhnya mengakui keberadaan mereka secara hukum.

Terdapat penelitian lain dalam mengungkap bagaimana para pedagang kecil bertahan hidup pada era setelah pandemi Covid-19. Lova Sukoco et al., (2023) mengkaji bagaimana pedagang Pasar Tanjung di Jember berstrategi sosial dan ekonomi menekan biaya produksi dan membangun jaringan sesama pedagang dan keluarga untuk bertahan hidup. Penulis melihat fenomena ini menggunakan teori konstruksi sosial Berger dan Luckman bahwa berdagang bukan hanya untuk mencari untung, tetapi sudah menjadi bagian dari identitas sosial dan upaya dalam bertahan hidup. Perbedaannya dari sini bisa dilihat bahwa penelitian ini lebih berfokus pada praktik ekonomi dan negosiasi yang terjadi pada pedagang kaki lima dan menyinggung isu tata ruang kota dan kebijakan didalamnya.

Kegiatan pedagang kaki lima Taman Seribu Lampu di ruang publik ini pada dasarnya tidak hanya dapat dipahami dalam sistem ekonomi formal yang mengejar keuntungan saja. Faktanya, bagi mereka berdagang merupakan bagian dari strategi

untuk mempertahankan sumber penghidupan, memenuhi kebutuhan keluarga, sekaligus membangun jejaring sosial dengan sesama pedagang maupun pembeli. Mengerucut pada persoalan bagaimana pedagang kaki lima ini bertahan hidup dalam kondisi yang tidak menentu, dapat dikaji pada bab-bab selanjutnya melalui teori Keith Hart sektor informal yang melihat ekonomi informal merupakan aktivitas ekonomi yang tidak terikat dengan regulasi ketenagakerjaan formal. Aktivitas pedagang kaki lima di Taman Seribu Lampu saat berdagang tidak dilihat sebagai aktivitas ekonomi saja melainkan harus juga dipahami sebagai strategi bertahan yang terikat dengan jaringan paguyuban, dan regulasi yang mengikat dari pihak otoritas negara yang pada penelitian ini direpresentasikan oleh Satpol PP Kecamatan Cepu. Adanya praktik pembayaran iuran kebersihan kepada pihak dinas terkait pun menegaskan adanya negosiasi ruang yang terjadi di sana. Oleh karena itu, eksistensi pedagang kaki lima di ruang publik bukan sekadar bentuk melanggar aturan ruang terbuka hijau, tetapi merepresentasikan bentuk ekonomi informal masyarakat sekitar.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas menunjukkan bahwa keberadaan pedagang kaki lima di Taman Seribu Lampu menghasilkan dinamika sosial yang rumit. Di satu sisi taman berfungsi sebagai ruang publik yang idealnya dijadikan sebagai sarana tempat hiburan dan keindahan kota, dan disisi lain juga menjadi ruang hidup bagi para pedagang kaki lima untuk memenuhi sumber penghidupan. Dengan menghadapi kondisi tersebut pedagang kaki lima Taman Seribu Lampu mulai berstrategi bagaimana bertahan hidup melalui jaringan sosial dan aktivitas ekonomi informal, beserta apa bentuk-bentuk strategi sehari-hari dalam merespons keterbatasan dan kebijakan yang ada. Penyusunan penelitian ini diharapkan dapat melihat pentingnya kajian mendalam mengenai hubungan antara ruang publik dan sektor informal, sehingga penelitian ini akan condong pada berbagai strategi bertahan yang dilakukan oleh Pedagang kaki lima di Taman Seribu Lampu.

1.2 Rumusan Masalah

Bromley R. (2000: 3) pada esainya yang berjudul '*Street Vending and Public Policy: A Global Review*' menjabarkan bahwa aktivitas berdagang di jalanan dan ruang publik mencakup sisi yang luas, dimulai dari strategi bertahan yang subsisten hingga bentuk kapitalisme kecil yang berorientasi pada pengembangan

usaha dan peningkatan omset. Sama seperti gagasan Keith Hart tentang sektor informal, Maes (2003: 52) menjelaskan ekonomi informal sebagai usaha kecil yang tidak tercatat atau tidak dilindungi oleh hukum. Pedagang kaki lima cenderung berkumpul di area dengan peluang bisnis tinggi dengan sadar karena fokus pedagang di satu tempat justru menarik lebih banyak pelanggan dan meningkatkan perputaran ekonomi. Lebih lanjut lagi, Bromley R. (2000: 5) menegaskan bahwa pedagang punya pilihan dan hak untuk berdagang di ruang publik walaupun hak tersebut tidak dijamin oleh hukum formal, hak ini dipandang sebagai hak dasar yang muncul karena kebutuhan hidup. Kondisi inilah yang memposisikan pedagang kaki lima dalam posisi ekonomi aktif namun hukum rentan. Ketegangan yang mendorong mereka terus menegosiasikan keberadaan dan identitas mereka di ruang yang tidak sepenuhnya mengakui mereka.

Maka dari itu, peneliti ingin lebih jauh menyoroti tentang keberadaan pedagang kaki lima di Taman Seribu Lampu Kecamatan Cepu yang memiliki dinamika tersendiri. Awal mulanya Taman Seribu Lampu dibangun untuk memenuhi permintaan ruang terbuka hijau tiap daerah sesuai Peraturan Bappeda daerah Blora dan merepresentasikan identitas dari Kecamatan Cepu sebagai kota minyak, namun seiring perkembangan taman seribu lampu juga menjadi ruang ekonomi informal bagi Pedagang Kaki Lima. Fenomena inilah menimbulkan pertemuan dua kepentingan yang berbeda. Pemerintah yang berusaha menata dan menertibkan taman agar berfungsi selayaknya idealnya dari adanya taman kota sebagai ruang publik, sementara dari perspektif lain terutama bagi para pedagang kaki lima berusaha bertahan hidup dengan memanfaatkan ruang tersebut.

Hasil pengamatan dan wawancara singkat peneliti dengan beberapa pedagang di sana ternyata praktik berjualan mereka tidak serta merta tanpa izin atau ilegal melainkan memiliki legitimasi informal, butuh izin dari pihak otoritas terkait dan adanya paguyuban pedagang kaki lima. Kondisi nyata inilah yang menjadi pintu masuk penelitian ini, memperlihatkan adanya dinamika antara keterbatasan akses terhadap ruang ekonomi formal dengan upaya bertahan, pedagang tidak menyerah melainkan mendorong mereka untuk membangun tatanan dan strategi bertahan sendiri. Fenomena ini akan dikupas tajam melalui teori Keith Hart *Informal Sector* bukan ruang berantakan tanpa struktur, melainkan area di mana

aktor ekonomi informal tidak tertampung di sektor formal dan menciptakan peluang pendapatan sendiri. Oleh karena itu, penting untuk meneliti bagaimana strategi ekonomi pedagang kaki lima berlangsung di tengah ketidakpastian akses terhadap ruang publik, serta bagaimana proses negosiasi sehari-hari yang dilakukan pedagang kaki lima baik sesama pedagang melalui paguyuban maupun pada otoritas pemerintah yang memungkinkan mereka untuk tetap bertahan dan menjalankan aktivitas ekonominya di Taman Seribu Lampu. Untuk itu, diajukan pertanyaan utama penelitian yang akan menjadi acuan dalam upaya pembuktian atas penulisan dan penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi ekonomi Pedagang Kaki Lima dalam memanfaatkan ruang publik Taman Seribu Lampu Cepu?
2. Bagaimana ruang publik menjadi arena negosiasi ruang bagi para pedagang kaki lima di kawasan tersebut?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Pada sub bab berikut, peneliti akan menjelaskan tujuan dan manfaat dari penelitian yang peneliti lakukan. Tujuan dan manfaat penelitian yang saya tuangkan di sini merupakan hasil pertimbangan subjektif maupun objektif sebaik-baiknya.

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan narasi dan permasalahan yang telah peneliti paparkan diatas, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi strategi ekonomi pedagang kaki lima dalam memanfaatkan fungsi ruang publik Taman Seribu Lampu. Selanjutnya, penelitian ini juga ingin mengetahui bagaimana proses praktik ekonomi pedagang kaki lima berlangsung sehari-hari dan bagaimana mereka menegosiasikan posisi diri di tengah keterbatasan ruang, kebijakan, dan tekanan ekonomi yang mengelilingi mereka. Kuncinya terletak pada cara pandang pedagang kaki lima menavigasi kebutuhan ekonomi rumah tangga dalam kondisi struktural yang sering membatasi ruang akses maupun gerak, bukan melalui resistensi terbuka, melainkan adaptasi, negosiasi, dan penguatan jaringan sosial yang berlangsung namun konsisten sehingga penelitian ini diharapkan akan memberikan pemahaman lebih mendalam tentang hubungan ruang publik, praktik ekonomi

informal, dan strategi ekonomi kelompok ekonomi informal yang terpinggirkan daerah urban kecil di Indonesia.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini dapat dibagi menjadi dua kategori, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dedikasi bagi keilmuan antropologi terkait antropologi ekonomi dan kajian ruang publik. Dari penelitian ini bisa menggambarkan bagaimana aktivitas ekonomi yang dijalankan pedagang kaki lima menjadi bagian dari strategi ekonomi dan memperbanyak pemahaman mengenai ekonomi informal, adaptasi praktik masyarakat kecil, dan ruang publik.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademisi

Ditujukan sebagai rujukan alternatif bagi akademisi tentang fenomena ekonomi informal dan ruang publik terutama berkaitan dengan strategi ekonomi pedagang kaki lima di salah satu wilayah kota kecil yang menjadi pusat ekonomi Kabupaten Blora, yakni Kecamatan Cepu.

b. Bagi Peneliti

Peneliti mendapatkan pemahaman faktual dan baru mengenai dinamika pedagang kaki lima dalam memanfaatkan ruang publik untuk mendapatkan penghasilan harian.

c. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini dapat dijadikan untuk referensi untuk penelitian selanjutnya yang ingin lebih dalam mengkaji tentang ekonomi informal, resistensi, maupun ruang publik di wilayah lain.

1.4 Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori

Pada sub bab di bawah ini, peneliti akan menjabarkan literatur-literatur yang relevan dan dapat dijadikan pembanding studi dan menguraikan kerangka teori dan konsep difungsikan sebagai lensa analisis untuk membedah temuan etnografis di lapangan.

1.4.1 Tinjauan Pustaka

Banyak literatur yang sudah mengkaji bagaimana strategi bertahan dan ekonomi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat kecil dalam menghadapi berbagai keterbatasan ekonomi. Pada penelitian ini subjek utama yang diteliti adalah pedagang kaki lima yang berjualan aktif di sepanjang area Taman Seribu Lampu. Selain karena mereka tidak punya penghasilan yang tetap dalam beroperasi di sektor informal, seringkali mereka memanfaatkan ruang publik untuk dijadikan tempat aktivitas ekonominya. Hal inilah yang perlu dikaji lebih dalam lagi, bagaimana mereka beradaptasi dari ketidakpastian ruang dari pedagang kaki lima Kecamatan Cepu pada saat mereka berdagang untuk sumber kehidupan, serta apakah mereka baik-baik saja selama ini menggunakan ruang publik Taman Seribu Lampu, dimana fungsi dari sesungguhnya taman tersebut adalah untuk pemenuhan ruang terbuka hijau Kecamatan Cepu tetapi justru ditemukan bahwa taman tersebut sudah diproduksi ulang oleh para pedagang. Sebelum menjabarkan lebih dalam lagi dari berbagai literatur yang dijadikan tinjauan pustaka dan pembandingan pada penelitian ini, peneliti mengelompokkan kajian literatur ke dalam dua tema, yaitu kajian yang membahas tentang pedagang kaki lima dan kajian mengenai ruang publik. Kedua tema ini digunakan untuk memetakan posisi penelitian ini antara studi-studi terdahulu sekaligus mengidentifikasi celah yang menjadi kontribusi penelitian ini.

Sebelum itu belum ada ditemukan penelitian spesifik mengenai pedagang kaki lima di Taman Seribu Lampu terutama bagaimana strategi bertahan mereka dalam berekonomi. Terdapat penelitian terdahulu yang berlatarkan sama, di Taman Seribu Lampu oleh Andrea & Raidi, S (2021) yang lebih berfokuskan pada fungsi Taman Seribu Lampu setelah revitalisasi ternyata mengalami perkembangan fisik sehingga fungsi ganda dari taman tersebut ikut berkembang. Ditemukan juga bahwa kebijakan Pemkot Cepu hanya memberikan izin bagi pedagang kaki lima berjualan di zona taman tiga dan zona taman empat dengan syarat harus tetap menjaga kebersihan. Peneliti di sini menggunakan konsep behavioral mapping oleh Sommer dalam melihat aktivitas pengguna taman dan metode setting fisik untuk penelitian.

Selanjutnya, dalam penelitian yang dilakukan oleh Mardiyah et al., (2021) disebutkan bahwa pedagang kaki lima di Kota Sorong tepatnya Kelurahan Remu

Utara memanfaatkan lapak kosong di depan pertokoan, pinggir jalan bahkan trotoar untuk tempat mereka berdagang. Pedagang di sana, melakukan negosiasi tempat jualan dengan sesama pedagang, pemilik toko, dan menyepakati aturan lisan. Mereka para pedagang juga memberikan pungutan liar untuk suatu oknum guna aman selama berjualan. Namun, dari hal inilah memunculkan stigma bahwa di area sekitar Kelurahan Remu Utara merupakan tempat yang kumuh karena hadirnya pedagang kaki lima, sering terjadi macet, dan rentan pada aktivitas gangguan eksternal seperti demo. Peneliti menggunakan teori konflik sosial oleh Ritzer untuk mengkaji fenomena tersebut.

Strategi Bertahan yang dilakukan oleh pedagang kaki lima lainnya bisa dilihat dari penelitian ilmiahnya Indahsari et al., (2018) yang mana memaparkan pedagang asongan perempuan di Stasiun Selero Kecamatan Lubuklinggau yang menerapkan tiga strategi guna bertahan hidup, melalui teori Talcott Parsons dapat diidentifikasi bahwa strategi aktifnya adalah pedagang perempuan ini memiliki pekerjaan sampingan; Strategi pasifnya hidup dengan hemat meminimalisir pengeluaran, dan strategi jaringan yang memanfaatkan relasi sosial (seperti keluarga, tetangga, arisan, koperasi) untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Setidaknya dari penerapan tiga strategi tersebut, pedagang asongan perempuan dapat membantu sedikit kebutuhan keluarga meskipun penghasilan sangat kecil dan tidak menentu. Hal ini menyatakan bahwa dengan keterbatasan yang dipunya, pedagang tetap gigih dan bertahan di tengah ekonomi yang pas-pasan.

Penelitian lain yang membahas detail tentang bagaimana pedagang kaki lima dalam memanfaatkan ruang publik sebagai ruang ekonomi adalah skripsi yang ditulis oleh Wijaya M. (2025) menyoroti cara strategi bertahan hidup pedagang kaki lima dengan berjualan di ruang terbuka hijau Kecamatan Genteng. Miranda juga menemukan bahwa para pedagang mampu bertahan hidup dengan mengadopsi berbagai strategi, dari beradaptasi dengan penertiban oleh dinas kota terkait, memvariasikan macam-macam menu dagangan, menggunakan media sosial untuk promosi, serta mengandalkan jaringan sosial antar pedagang.

Penelitian terdahulu yang membahas tentang pedagang kaki lima yang berjualan di ruang terbuka hijau publik adalah Mufira & Aisah (2024) dimana pedagang memanfaatkan Alun-alun Kota Jember untuk tempat membuka usaha.

Hasil penelitian melihat pedagang beradaptasi dengan merepresentasikan produk dan kios mereka seperti pembaruan visual atau nama produk yang lebih menarik pelanggan. Selain itu pada penelitian ini ditemukan melemahnya ikatan sosial antara penjual dan pembeli yang cenderung lebih memilih berdasarkan pertimbangan rasional (harga dan kualitas) daripada hubungan pribadi. Mereka si peneliti menyarankan agar pemerintah menyediakan area khusus bagi para pedagang kaki lima untuk mempertahankan kehidupan ekonomi lokal. Persamaan penelitian ini dengan penelitian ini pada fokus kajian mengenai pemanfaatan ruang publik oleh pedagang kaki lima sebagai aktivitas ekonomi.

Penelitian lain yang memperlihatkan bagaimana negosiasi antara pedagang kaki lima dengan pihak yang memiliki wewenang atas ruang publik tersebut dilakukan oleh (Rachmawan et al., 2021). Keberadaan dan kelangsungan hidup pedagang kaki lima di daerah segitiga emas kawasan CBD Jakarta dipengaruhi oleh pengakuan formal dan informal antara pedagang dan ‘pemberi izin’ yang dibangun melalui negosiasi dan ikatan sosial. Hubungan itulah yang menjadi dukungan praktis seperti akses pada ruang, fasilitas, dan perlindungan termasuk upaya melegalkan bisnis para pedagang kaki lima. Ditemukan juga para pedagang kaki lima memiliki potensi dapat pemasukan lebih tinggi, hanya beberapa dari mereka yang memiliki pendapatan kurang dari upah minimum regional DKI Jakarta dan tepatnya sebagian dari mereka dapat memperoleh penghasilan antara sembilan juta sampai sebelas juta rupiah.

Berikutnya membahas penelitian pedagang kaki lima di kawasan alun-alun kauman semarang yang dilakukan oleh Oktaviani & Wibisono (2023) dimana mereka menemukan bahwa pedagang kaki lima cenderung menggunakan ruang publik sebagai tempat berjualan karena menguntungkan secara ekonomi karena ruang-ruang ini mendukung akses bisnis pembeli yang selaras dengan daya tarik area budaya seperti pasar johan di sekitarnya. Mereka juga mencatat bahwa para pedagang kaki lima berkelompok berdasarkan jenis barang yang dijualnya di area dengan intensitas pengunjungnya yang tinggi. Namun konflik atas penggunaan ruang muncul ketika trotoar, bahu jalan, dan area depan toko yang dipakai menjadi lapak sehingga menghambat aksesibilitas pejalan kaki. Penelitian ini memperlihatkan bahwa keberadaan pedagang kaki lima tidak bisa dilepas dari

karakteristik ruang publik yang ditumpangi. Hal ini menunjukkan bahwa untuk memahami dinamika pedagang kaki lima diperlukan pemahaman ruang publik sendiri yang menceritakan bagaimana ruang tersebut dikonsepsikan, dikelola dan diperebutkan penggunaannya oleh berbagai pihak. Oleh karena itu tinjauan pustaka selanjutnya beralih pada beberapa kajian yang berfokus pada ruang publik sebagai objek kajian untuk memperluas pemahaman spasial tempat aktivitas pedagang kaki lima berlangsung dan penerapan teori Keith Hart yang relevan pada kajian sektor informal seperti pedagang kaki lima di Taman Seribu Lampu.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Mannan (2018) mengkaji bagaimana kondisi penataan ruang terbuka hijau di kawasan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara belum sepenuhnya optimal. Penelitian ini menyebutkan bahwa potensi kawasan yang dapat ditata menjadi ruang terbuka hijau baru dengan nilai ekologis sekaligus estetika kota menegaskan bahwa masyarakat Kaidipang cenderung memilih ruang terbuka hijau publik yang memberikan kenyamanan, misalnya melalui ketersediaan fasilitas yang memadai dan lokasi yang dekat dengan pusat kota. Penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan ruang publik umumnya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan kenyamanan dan fasilitas bagi masyarakat. Akan tetapi, realitas di lapangan menunjukkan bahwa ruang publik tidak selalu berfungsi sesuai perencanaan ideal pembangunan tetapi ikut menjadi arena bagi aktivitas oleh pedagang kaki lima, sehingga memunculkan dinamika penggunaan ruang yang lebih dinamis daripada sekadar pemenuhan fungsi keindahan kota.

Penelitian lain yang membahas tentang ruang terbuka hijau adalah penelitian yang dilakukan oleh (Hidayatullah et al., 2026) dimana pedagang kaki lima tetap berjualan di sekitaran ruang terbuka hijau sehingga muncul konflik bagi Satpol PP selaku penegakan peraturan daerah dan pedagang kaki lima. Satpol PP di penelitian ini menerapkan pengawas rutin untuk mengawas pedagang kaki lima dengan melakukan patroli rutin, tindak lanjut laporan atau pengaduan masyarakat segera mungkin, pembinaan, dan sosialisasi yang situasional tergantung kondisi yang akan ditangani dengan cepat dan tanggap. Namun pengawasan ruang terbuka hijau oleh Satpol PP masih ada kendala seperti di jangkauan patroli yang belum terlalu luas pada titik-titik ruang terbuka hijau, belum memanfaatkan CCTV dan

pos jaga, dan kurangnya konsisten dan koordinasi antar instansi belum berjalan secara optimal.

Beralih dari kajian ruang publik, terdapat penelitian lain yang memakai teori *informal sector* yang sama dengan teori peneliti gunakan, yakni penelitian yang dilakukan oleh Lorato et al., (2023) meneliti Kota Hawassa di Ethiopia. Mereka menyimpulkan bahwa sektor informal memiliki peran krusial dalam meningkatkan kesejahteraan kaum muda di Kota Hawassa. Dari 67% responden menyatakan jika andil mereka dalam sektor informal mampu memperbaiki kondisi hidup seperti pemenuhan kebutuhan dasar, mengurangi angka pengangguran, membantu ekonomi keluarga, melanjutkan pendidikan, hingga memiliki aset tetap. Dari penelitian ini memberitahukan bahwa sektor informal bukan berisi aktivitas ekonomi pinggiran tetapi menjadi penyokong sumber kehidupan masyarakat Kota Hawassa di tengah urbanisme yang meningkat, sehingga bergabung ke dalam sektor informal bisa dikatakan menjadi sarana penghidupan masyarakat Ethiopia.

Penelitian lain yang memakai perspektif sektor informal oleh Keith Hart dilakukan oleh (Sahu, 2026). Ia menemukan bahwa sebagian besar pedagang kaki lima di distrik Kalahandi di kota Bhawanipatna tidak berpendidikan dan termasuk dalam masyarakat miskin. Teori Keith Hart di sini juga menganalisis kontribusi perempuan dan anak-anak sebagai pedagang jalanan menjadi penghasilan tambahan bagi keluarga mereka. Mereka menjual buah-buahan, sayur, sepatu, mainan, dan lain-lainnya. Ketika sektor formal tidak mampu menyediakan pekerjaan tetap maka berjualan informal memberikan kesempatan untuk mengurangi kemiskinan. Ditemukan 54, 8% pekerja perempuan di sektor informal non pertanian. Persamaan dari penelitian Sahu (2026) dengan penelitian ini adalah sama-sama ingin mengungkap bahwa bergabung dalam sektor informal sebagai bentuk strategi bertahan mereka.

Berdasarkan kedua tema tinjauan literatur yang telah dipaparkan baik kajian mengenai pedagang kaki lima maupun kajian mengenai ruang publik dapat dilihat keduanya memang saling berkaitan, di mana ruang publik berfungsi sebagai objek perencanaan tata kota dan menjadi arena bagi berlangsungnya aktivitas ekonomi informal, sebagaimana yang terjadi pada pedagang kaki lima. Lebih dari itu, sebagian besar penelitian terdahulu yang peneliti uraikan lebih condong membahas

salah satu aspek dengan terpisah baik berfokus pada strategi dan dinamika pedagang kaki lima, maupun pada tata kelola ruang publik tanpa banyak mengeksplorasi bagaimana keduanya saling membentuk satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari.

1.4.2 Landasan Teori

Dalam realitas sehari-hari, pedagang kaki lima merupakan salah satu bagian dari kegiatan ekonomi di perkotaan yang tumbuh dan bertahan di luar sistem ekonomi formal (Muhammad & Herwangi, 2025: 182). Penelitian ini berlandaskan pada pemahaman mengenai ekonomi informal sebagai kerangka untuk melihat fenomena strategi yang dilakukan pedagang kaki lima di ruang publik Taman Seribu Lampu. Pedagang kaki lima yang tidak dilindungi dan bebas dari hukum formal yang ada, menjadikan kekurangan tersebut untuk bertahan guna menghadapi realita semu di depan mereka. Keberadaan pedagang kaki lima tidak bisa dilepaskan dari keterbatasan akses terhadap lapangan pekerjaan formal, sehingga sektor informal menjadi solusi kedua bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup. Aktivitas jualan yang dilakukan pedagang kaki lima memanfaatkan ruang publik, seperti taman kota yang menunjukkan adanya ekonomi adaptif dalam menghadapi tekanan kebijakan penataan tata ruang kota.

Aktivitas Ekonomi Informal secara terbuka pertama kali ditemukan oleh Keith Hart yang ditulis pada esainya yang berjudul Informal *“Income Opportunities and Urban Employment in Ghana”* yang merupakan seorang antropolog sosial. Pada awalnya ia menggunakan konsep ekonomi informal ini melalui penelitiannya pada kelompok suku Frafra, migran miskin Ghana yang berpindah pindah dari daerah satu ke daerah lain di Ibukota Ghana yang bertujuan untuk mencari peluang materi. Sektor informal menurut Keith Hart didefinisikan sebagai aktivitas ekonomi yang tidak terorganisir seperti usaha kecil yang berlangsung diluar regulasi formal negara. Ia juga menjelaskan bahwa sektor informal adalah bagian angkatan kerja di kota yang berada di luar pasar tenaga kerja yang terorganisir (Budiman, 2021). Sementara itu, ILO (*international labour organization*) berasumsi sektor informal secara garis besarnya merupakan penghindaran pajak dan pengawasan lemah (Bangasser, 2000). Aktivitas yang tidak dilindungi, tidak tercatat, tidak diakui, dan

tidak diatur. Sektor informal mencakup aktivitas mulai dari pekerjaan marjinal untuk bertahan hidup hingga usaha yang menguntungkan.

Keith Hart membedakan sektor formal dan sektor informal dari segi upah. Keith Hart (1973: 68) mengemukakan bahwa sektor formal (*wage employment*) dicirikan dengan tenaga kerja tetap, upah tetap dan dibawah administrasi perlindungan negara dan sebaliknya sektor informal (*self employment*) Keith hart mendefinisikannya sebagai pekerjaan dengan upah tidak stabil, tidak diatur oleh birokrasi negara dan mandiri serta kreatif. Ia juga menjabarkan bahwa pendapatan upah hanyalah sebagian dari struktur kesempatan kerja di perkotaan, dan sebagai masyarakat tidak perlu berpikir bahwa semua orang yang masuk ke dalam pekerjaan informal melakukannya sebagai akibat dari kegagalan untuk mendapatkan pekerjaan berupah. Dengan kata lain Keith Hart menyatakan bahwa karena tidak berhasilnya dalam struktur kesempatan kerja formal, masyarakat proletariat perkotaan ini mencari cara-cara informal untuk meningkatkan pendapatan mereka.

“denied success by the formal opportunity structure, these members of the urban sub-proletariat seek informal means of increasing their incomes.”
(Hart, 1973:67)

Aslinya pada aktivitas informal mencakup skala yang luas, mulai dari aktivitas marjinal hingga perusahaan besar. Hart menjelaskan tanpa adanya perlindungan hukum atau sumber daya formal, sektor informal masih mampu untuk memberikan peluang pendapatan. Aktivitas ekonomi informal mempunyai peran penting dalam menghidupi kehidupan rumah tangga miskin sehari-hari, dimana bisa dikatakan Keith Hart menyampaikan bahwa ekonomi informal bukan sekadar ekonomi tidak rasional melainkan sebagai strategi penghidupan yang adaptif terhadap keterbatasan akses.

Pada teori ini mengatakan bahwa sektor informal muncul sebagai bentuk peluang pendapatan yang berkembang di luar struktur ekonomi formal. Hart membagi dua jenis peluang pendapatan informal yang sah (*informal income opportunities: legitimate*) dan peluang pendapatan informal tidak sah (*informal income opportunities: illegitimate*). Pada skala peluang pendapatan informal yang sah mencakup berbagai aktivitas ekonomi yang dibedakan menjadi 5 kategori: yakni ada 1) kegiatan primer dan sekunder yang berisikan pertanian, peternakan,

kontraktor bangunan, pengrajin wiraswasta, pembuat sepatu, penjahit, dll. 2) Perusahaan tersier dengan modal yang besar seperti perumahan, transportasi, utilitas, kegiatan penyewaan 3) Distribusi Skala kecil diisi oleh koperasi pasar, pedagang kaki lima, pedagang asongan, katering makanan dan minuman, dll; 4) Jasa mandiri lainnya meliputi fotografer, pemusik, tukang cuci, penyemir sepatu, dll 5) Pembayaran transfer pribadi yang meliputi hadiah dan aliran uang, barang yang dilakukan oleh individu, meminjam, dan mengemis. Adapun juga pada peluang pendapatan informal tidak sah yang berisikan aktivitas informal ilegal mencakup pencurian, prostitusi, perjudian, hingga praktik suap dan korupsi. Jika ditarik konteks penelitian ini, pedagang kaki lima Taman Seribu Lampu termasuk dipahami sebagai aktivitas informal yang legal dalam kategori *small-scale distribution* atau distribusi skala kecil. Sehingga, sektor informal dipahami sebagai ruang ekonomi lain yang digunakan masyarakat urban untuk mempertahankan hidup ditengah sistem kapitalisme dan keterbatasan akses pada sumber daya.

Pada artikel Keith hart yang lain berjudul “the informal economy” tahun 1985, ia memperdalam konsep dualisme formal-informal dengan menawarkan tiga rangka untuk memahami relasi antar keduanya. Pertama, informal adalah bagian dari hal formal itu sendiri, dimana aktivitas informal justru melengkapi rantai formal secara tidak terlihat (1985: 57). Kedua, informal berarti segala hal yang bukan formal, mencakup fenomena seperti penghindaran pajak, resistensi buruh pada perusahaan, hingga perdagangan ilegal. Rangka ini menekankan bahwa aktivitas informal ada karena bentuk perlawanan dari aturan formal yang ada. Ketiga, Informal adalah sisa yang tidak diatur oleh hal formal yang maksudnya adalah aktivitas informal tidak didasarkan pada sistem formal yang berdiri sendiri di luar keduanya.

Menurut Bonnet & Venkatesh (2016: 642) Keith Hart menjabarkan bahwa informalitas dipahami sebagai cara bertahan hidup diantara masyarakat urban yang terpinggirkan sekaligus menjadi faktor yang mereproduksi keterasingan mereka dari arus utama sosial dan ekonomi. Pedagang kaki lima sebagai pelaku informal berdagang dengan memanfaatkan ruang publik sebagai lapak untuk pemenuhan sumber pendapatan. Namun saat proses pemanfaatan ruang publik tersebut sering

berlangsung dalam kondisi ambiguitas regulasi, dimana terdapat tuntutan adanya izin dari pihak otoritas tanpa diikuti oleh payung hukum yang jelas.

Keith Hart menyebutkan informal economy muncul dari aktivitas ekonomi yang di luar sistem institusi resmi hal ini dikarenakan gagalnya sistem pembangunan untuk menangkap realitas pekerjaan dan pendapatan di negara dunia ketiga (Hart, 1985:54). Pemikiran Keith Hart mengenai sektor informal tidak dapat dilepaskan dari peran negara sebagai pembuat kebijakan. Ketika Hart menyebutkan sektor informal ini sebagai masalah ‘ekonomi politik’ (1973: 82) yang menuntut sikap terbuka pada arah kebijakan ketenagakerjaan seperti apakah mendorong ke arah sektor formal atau membiarkan ruang bagi para pelaku aktivitas informal yang mana hal ini menempatkan negara sebagai aktor yang menentukan batas-batas antara apa yang dianggap formal dan informal. Daripada menyebutkan sektor informal sebagai ruang yang berdiri di luar jangkauan negara sebaliknya akan lebih sesuai menyebutkan bahwa sektor informal terbentuk dan dibatasi oleh kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan oleh negara itu sendiri. Yang jika pada penelitian ini kehadiran negara dimanifestasikan melalui Satpol PP sebagai aparat yang secara langsung mengatur dan mengawasi ruang publik tempat para pedagang kaki lima berjualan sehingga menjadi representasi dari negara dalam relasi kuasa antara sektor formal dan informal.

Jika dihubungkan dengan aktivitas pedagang kaki lima, berdagang di tempat publik merupakan bentuk cara bertahan yang muncul dari keterbatasan struktural. Disisi yang lain, keterlibatan pedagang kaki lima dalam sektor informal juga membuat mereka menetap di luar sistem perlindungan dan pengakuan negara sehingga posisi mereka bisa terbilang rapuh dan rentan terhadap kebijakan dan regulasi yang mengatur. Pedagang kaki lima di Taman Seribu Lampu mengalami hal yang serupa karena posisi mereka yang tidak sah membuat mereka mendapat tekanan ketidakjelasan status hukum, penggusuran, dan masyarakat sekitar yang menganggap mereka mengganggu kelancaran lalu lintas jalan. Kondisi inilah yang menunjukkan bagaimana informalitas tidak hanya menjadi solusi sementara bagi keberlangsungan materi hidup tetapi juga mereproduksi keterasingan pedagang kaki lima dari arus utama pembangunan kota.

Didukung oleh pernyataan (Bonnet & Venkatesh, 2016) mengenai aktivitas ekonomi informal diatur berdasarkan aturan tidak tertulis, kesepakatan agen lokal, dan jaringan sosial yang terbentuk dalam komunitas. Begitupun pedagang kaki lima di Taman Seribu Lampu, keberadaan paguyuban pedagang kaki lima bisa dipahami sebagai bentuk peraturan non formal yang mengatur pembagian ruang, lapak berjualan, relasi pedagang, dan menjadi sarana menghadapi konflik dengan penegak ketertiban maupun masyarakat sekitar.

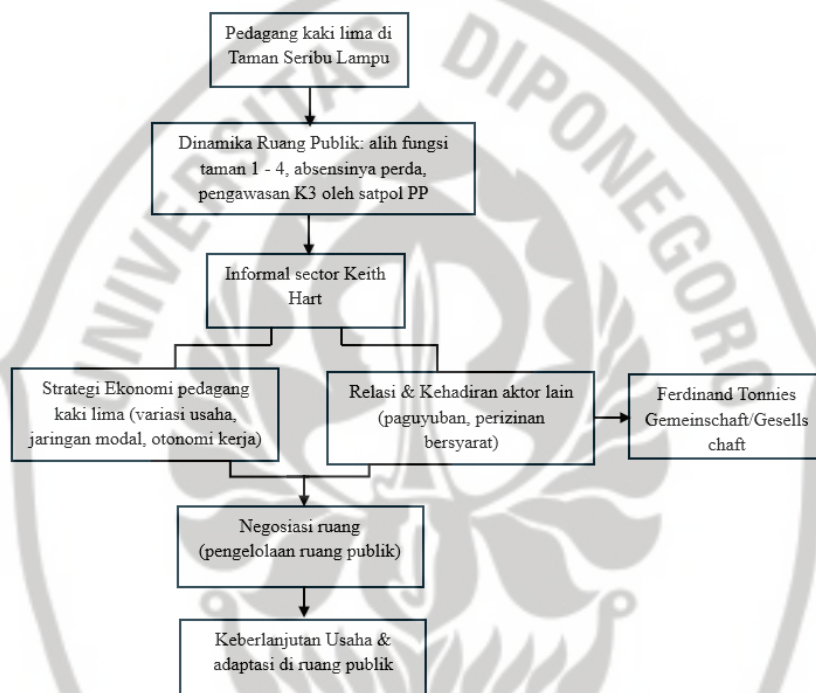
Untuk memahami lebih jauh sifat dari paguyuban sebagai bentuk lembaga sosial informal yang dibentuk, penelitian ini merujuk pada konsep paguyuban/patembayan atau *gemeinschaft/gesellschaft* oleh Ferdinand Tonnies (1963: 52) dimana ia mendefinisikan paguyuban merupakan hubungan sosial yang terjadi pada masyarakat yang didasarkan pada ikatan yang alami berdasarkan nilai-nilai kekeluargaan, sebaliknya patembayan ini lebih bersifat sementara, hubungan sosial yang sengaja dibentuk karena memiliki tujuan yang sama atau kepentingan tertentu sehingga hubungan di dalamnya lebih situasional dan transaksional. Paguyuban Taman Seribu Lampu lebih condong pada karakter patembayan bahwa mengetahui bagaimana paguyuban berfungsi sebagai media dan jembatan antara pedagang kaki lima dengan aparat pemerintah tanpa berperan lebih solidaritas lagi dalam pemenuhan kebutuhan para anggotanya dalam beraktivitas ekonomi informal yang mana hal ini akan dianalisis lebih dalam di bab-bab selanjutnya.

Pedagang kaki lima yang masih diluar regulasi formal dan aktivitas ekonomi informal masih tidak lepas dari rasionalitas ekonomi pasar. Gagasan Keith Hart memahami sejauh apa pedagang kaki lima mempertahankan akses pada ruang publik dan bagaimana mereka bertahan di tengah relasi kuasa dengan negara yang mengingat bahwa sektor informal tidak pernah lepas dari kebijakan dan batasan yang ditetapkan oleh negara. Sementara itu, melihat bagaimana pedagang kaki lima membangun aturan sendiri untuk menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi informal mereka, penelitian ini juga memasukkan konsep paguyuban/patembayan yang digunakan untuk membaca keberadaan paguyuban sebagai organisasi sosial yang mengatur pembagian ruang, relasi antar pedagang kaki lima, dan mediasi konflik dengan pihak luar.

1.5 Kerangka Berpikir

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, penelitian ini berangkat dari pertanyaan peneliti. Bagaimana bentuk strategi ekonomi Pedagang Kaki Lima dalam memanfaatkan ruang publik tepatnya yaitu Taman Seribu Lampu dan apakah hal tersebut bisa mempertahankan aktivitas ekonomi mereka? Peneliti menggambarkan alur umum penelitian yang akan dilakukan ke dalam kerangka berikut:

Gambar 1. 1 Bagan Kerangka Berpikir



Penelitian ini berangkat dari fenomena hadirnya Pedagang Kaki Lima di Taman Seribu Lampu yang mana mereka adalah subjek utama dari penelitian ini yang diposisikan paling atas dalam bagan tersebut. Taman yang pada awalnya diciptakan sebagai ruang publik dan ruang terbuka hijau kini memiliki fungsi ganda, selain menjadi sarana hiburan masyarakat, dijadikan juga sebagai ruang ekonomi bagi para pedagang kaki lima. Dinamika ini dibarengi dengan keterbatasan ruang dan ketidakjelasan regulasi, dimana tidak ditemukannya perda khusus yang mengatur penataan pedagang kaki lima di area tersebut. Kondisi tidak adanya regulasi jelas ini menempatkan Satpol PP Kecamatan Cepu sebagai penegak ketertiban umum (K3) yang mewakili citra negara di lapangan.

Untuk menganalisis fenomena ini peneliti memakai teori sektor informal Keith Hart (1973). Teori Keith Hart memandang bahwa aktivitas ekonomi informal yang dilakukan pedagang kaki lima merupakan peluang pendapatan informal di luar regulasi formal negara yang menjadi penghasilan utama kehidupan rumah tangga masyarakat terpinggirkan. Pada penelitian ini, pisau analisis Keith Hart dipakai ke dalam dua fokus yang menjadi rumusan masalah. Pada strategi ekonomi, peneliti menganalisis cara-cara adaptif mereka dalam mengelola usaha setiap harinya dimulai dari fleksibilitas variasi produk atau jasa yang dijual, otonomi jam kerja, tenaga kerja keluarga, pemanfaatan jaringan permodalan, dan upaya membangun relasi dengan pelanggan. Lalu selanjutnya pada relasi dan kehadiran aktor lain, peneliti melihat bagaimana interaksi pedagang dengan aktor-aktor lain. Dari sisi lembaga informal yang ada, penelitian ini menggunakan pemikiran Ferdinand Tonnies paguyuban/patembayan untuk mendukung pemikiran Keith Hart. Penelitian ini melihat ikatan paguyuban yang awalnya bersifat solid seperti paguyuban ternyata sebaliknya yang terbatas pada fungsi administratif sehingga pedagang kaki lima harus mencari jaminan keselamatan ekonomi dengan mandiri. Di sisi lain, relasi dengan Satpol PP memunculkan bentuk legitimasi informal lewat perizinan bersyarat.

Kedua hal diatas berkaitan dan berujung pada negosiasi sosio spasial, antara lain bentuk mereka berkomunikasi, alokasi ruang, dan penyesuaian waktu berjualan antara para pedagang kaki lima, pengurus paguyuban, dan Satpol PP di sepanjang zona Taman Seribu Lampu. Melalui alur kerangka berpikir ini, penelitian pada akhirnya menjelaskan bagaimana para pedagang kaki lima melakukan adaptasi spasial dan menjaga keberlanjutan usaha di tengah ruang publik yang penuh ketidakpastian struktural.

1.6 Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan apa saja yang dilakukan oleh pedagang kaki lima Taman Seribu Lampu dalam mempertahankan aktivitas berdagangnya ditengah keterbatasan mereka dalam mengakses ruang ekonomi informal. Berbagai strategi mereka lakukan sebagai upaya menjaga keberlangsungan hidup melalui Pendekatan dan Jenis Penelitian ini menggunakan metode etnografi analitik dengan jenis penelitian kualitatif.

1.6.1 Jenis Penelitian

Pengumpulan data penelitian ini akan berasal dari proses wawancara mendalam dan observasi lapangan yang dilakukan peneliti sehingga termasuk ke dalam kategori penelitian kualitatif. Menurut Creswell (2017) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang pendekatannya menegaskan untuk mengeksplor, mencari pemahaman makna individu atau kelompok dan menginterpretasikan kompleksitas suatu kondisi. Selain dari itu, pendekatan kualitatif dapat membantu dalam proses penemuan fenomena inti berdasarkan pengalaman yang mereka miliki. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk mengetahui fenomena subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain menggunakan deskriptif dalam bentuk kalimat dan bahasa sehingga dapat dipahami bahwa metode kualitatif digunakan untuk pengembangan konsep pemahaman yang mengedepankan kepekaan peneliti terhadap data yang diperoleh dari subjek dan objek penelitian yang spesifikasi penelitiannya nanti akan berbentuk analisis.

Selaras dengan hal tersebut, metode etnografi dipilih untuk memungkinkan terkumpulnya data penelitian yang dibutuhkan (Nur & Utami, 2022). Menilik dari argumen Emerson et al., (2011) etnografi merupakan metode lapangan yang mempelajari tentang suatu kelompok yang menjalani rutinitas hariannya. Menurut (Spradley & James, 1997) etnografi bertujuan untuk memahami cara pandang kehidupan suatu kelompok sebagaimana mereka memaknainya sendiri. Metode etnografi juga mempelajari peristiwa kultural yang menyajikan pandangan hidup subjek yang menjadi objek penelitian. Peneliti dalam melakukan observasi lapangan dilakukan dalam dua rentang waktu yakni 15 hari yang dibagi atas 7 hari pada tahap pertama untuk mengeksplor berbagai dinamika di lapangan lalu 8 hari setelahnya dilakukan pada tahap pendalaman. Durasi penurunan lapangan oleh peneliti ini diterapkan dan dibagi menjadi ke dalam dua shift saat mengamati aktivitas di taman. Peneliti membedakannya di waktu sore hari dan malam hari untuk melihat dinamika perubahan ruang yang menyeluruh. Untuk menyelesaikan pengumpulan data pada hari ke 15 didasarkan pada prinsip kejenuhan data, dimana informasi yang peneliti dapatkan dari 16 informan sudah menemukan titik yang

sama dan menyatu serta tidak lagi memunculkan variasi pola sosial ekonomi yang baru di lapangan.

1.6.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini berfokus pada pengalaman para pedagang kaki lima di area sekitar ruang publik Taman Seribu Lampu. Taman Seribu Lampu terletak di Kelurahan Balun, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Taman Seribu Lampu terletak secara strategis di pusatnya kecamatan Cepu, Taman Seribu Lampu Cepu juga dikenal sebagai jantungnya masyarakat cepu karena posisinya yang berada di tengah kecamatan dan berdekatan dengan sejumlah fasilitas vital maupun publik di sana. Di sisi timur taman terdapat kantor Kecamatan Cepu, dan di sebelah utara taman terdapat RSUD DR. R. Soeprapto Cepu, serta tidak jauh dari Taman Seribu Lampu, terdapat juga taman kota Kecamatan Cepu yang lebih kecil yakni Taman Tuk Buntung yang menjadi salah satu tempat populer bagi anak-anak muda berkumpul. Selain itu, Taman Tuk Buntung juga menjadi salah satu tempat relokasi bagi sebagian pedagang kaki lima di Taman Seribu Lampu.

Lebih lanjut peneliti akan berfokus pada pedagang kaki lima yang berjualan aktif di dalam maupun di seberang Taman Seribu Lampu terkhususnya dari zona taman satu dan zona dua dikhususkan untuk pedagang kaki lima maupun yang di seberang Taman Seribu Lampu (pedagang yang jualan di area zona empat sampai zona enam lapaknya berada di trotoar). Lokasi ini dipilih karena menjadi titik paling berubah dalam interaksi antara fungsi taman sebagai ruang publik dan fungsi ekonomi bagi para pedagang kaki lima.

Sedangkan untuk waktu penelitian ini dilakukan dalam rentang dua bulan dua minggu, yaitu pada bulan Januari hingga Februari 2026. Saat turun lapangan dan pengumpulan data tidak dilakukan secara terus menerus, melainkan melalui kunjungan lapangan secara bertahap. Pada kunjungan awal dilakukan pada minggu kedua Bulan Januari tepatnya sejak tanggal 12 Januari sampai 18 Januari 2026, peneliti mulai melakukan observasi lapangan sekaligus pengumpulan data melalui wawancara dengan tujuh pedagang kaki lima dari berbagai zona Taman Seribu Lampu. Pada tahap ini, peneliti berfokus pada pemahaman mengenai aktivitas ekonomi pedagang kaki lima dan pola pemanfaatan ruang publik di Taman Seribu Lampu.

Pada kunjungan berikutnya yang dilakukan pada minggu ketiga bulan Februari, sejak tanggal 14 Februari sampai 21 Februari 2026, peneliti kembali turun lapangan lagi di area Taman Seribu Lampu. Kegiatan ini dilakukan untuk memperdalam data penelitian sekaligus menambah jumlah informan agar memperoleh informasi yang lebih variatif mengenai aktivitas pedagang kaki lima pada penggunaan ruang publik, dan relasi mereka dengan pihak otoritas terkait. Observasi pada tahap akhir ini dilakukan mulai dari pukul 15.00 hingga pukul 21.00 sehingga peneliti dapat mengamati aktivitas pedagang kaki lima pada dua rentang waktu yang berbeda yakni shift sore dan shift malam.

Saat waktu turun lapangan, peneliti melakukan observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi pada beberapa pedagang kaki lima di semua zona taman. Penambahan waktu observasi ini pada tahap kedua turun lapangan ini dilakukan hingga peneliti memperoleh titik jenuh data yang mana informasi yang sudah dikumpulkan dari informan-informan sebelumnya sudah menemukan pola yang sama sehingga tidak perlu memberikan variasi data lebih lagi. Oleh dari itu, total keseluruhan waktu penelitian selama 15 hari yang dirasa sudah berhasil mengumpulkan data yang mendalam dan mewakili aktivitas para pedagang kaki lima di Taman Seribu Lampu.

1.6.3 Penentuan Informan

Penentuan informan pada penelitian ini dilakukan melalui dua tahap yang berbeda namun melengkapi, yaitu *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Kedua teknik ini digunakan bertahap untuk memastikan bahwa informan yang terlibat benar-benar memiliki hubungan langsung dengan fenomena yang diteliti dan membuka ruang bagi peneliti untuk menjangkau informan lain yang relevan tetapi tidak diidentifikasi pada tahap awal observasi lapangan.

Peneliti menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah metode yang memastikan ilustrasi penelitian dengan sebagian pertimbangan tertentu yang bertujuan supaya informasi yang diperoleh nantinya lebih representatif. Pada *Purposive sampling* subjek penelitian dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan fokus penelitian. Kriteria yang harus dipenuhi dan memastikan informan yang dipilih akan relevan antara lain; 1) pedagang kaki lima yang aktif berjualan di area Taman Seribu Lampu 2) berdomisili Kecamatan

Cepu sekitarnya 3) pedagang kaki lima yang memiliki lapak usaha di area dalam taman maupun seberang Taman Seribu Lampu 4) informan yang bersedia diwawancarai dengan terbuka dan tanpa paksaan. Peneliti pakai *purposive sampling* untuk di awal terjun ke lapangan atau pada tahap awal dimana peneliti mendatangi langsung pedagang kaki lima yang sedang tidak melayani pembeli di Taman Seribu Lampu. Pemilihan ini didasarkan pada pertimbangan di lapangan sekaligus memperhatikan variasi informan dari segi jenis dagangan, posisi lapak, dan lamanya berjualan. Proses ini berlangsung hingga tujuh informan pertama khususnya pedagang kaki lima yang berhasil peneliti wawancarai.

Pada tahap terakhir, peneliti mulai menggunakan teknik *snowball sampling*. Teknik ini didefinisikan sebagai metode yang mengidentifikasi, memilih, dan mengambil sampel dalam suatu jaringan, atau rantai hubungan yang menerus (Nurdiani, 2014). Jadi *snowball sampling* salah satu pendekatan untuk menemukan informan-informan kunci yang memiliki banyak informasi. Pencarian informan tidak dilakukan secara acak di mana peneliti mengawali pengumpulan data dari informan bu sriatun sebagai pintu awal masuk di lapangan. Setelah sesi wawancara, beliau merekomendasikan mbak yuyu yang sama-sama membuka usaha cireng isi namun beda zona taman dalam penempatan lapak usaha. Selanjutnya peneliti mewawancarai mbak nita di taman dua lalu membangun kepercayaan sehingga mbak nita merekomendasikan peneliti untuk mewawancarai pak ipin dan mbak desi yang kemudian mengarahkan peneliti kepada bu nisa untuk wawancara lapangan. Dari wawancara mendalam dengan bu nisa, peneliti mendapatkan rekomendasi untuk bertemu dengan pak kawi. Total informan pada penelitian ini berakhir pada 14 pedagang kaki lima dan dua perwakilan dari Satpol PP Kecamatan Cepu sehingga total informan seluruh informan berjumlah 16 orang. Awalnya peneliti tidak membuat agenda untuk wawancara dengan pengurus paguyuban karena ketua paguyuban saat itu berhalangan diwawancara akibat kondisi baru sembuh keluar dari rumah sakit. Namun rekomendasi dari bu nisa mengarahkan peneliti pada pak kawi yang memiliki dualisme peran penting. Selain menjadi pedagang kaki lima yang berjualan di taman dua beliau juga menjabat sebagai sekretaris paguyuban pedagang kaki lima Taman Seribu Lampu sehingga kombinasi dua teknik ini dipilih

karena mampu menjangkau informan secara lebih luas dan tetap mempertahankan relevansi data dengan fokus penelitian.

Pengelompokkan informan akan dibagi menjadi tiga bagian, diantaranya informan kunci, informan utama, dan informan tambahan. Informan kunci merupakan informan yang berfungsi memberikan gambaran menyeluruh tentang dinamika yang terjadi dan situasi para pedagang kaki lima dengan pihak otoritas Taman Seribu Lampu, dimana informan kunci peneliti adalah sekretaris paguyuban pedagang kaki lima Taman Seribu Lampu. Sementara informan utama merupakan mereka yang terlibat langsung pada interaksi sosial yang sedang diteliti dimana pada penelitian ini merupakan 14 pedagang kaki lima yang telah diwawancarai serta informan tambahan yang melengkapi analisis kedalaman penelitian ini.

Perlu disampaikan bahwa semua nama dan usia informan dalam penelitian ini sudah disamarkan tanpa terkecuali baik informan dari kalangan pedagang kaki lima, pengurus paguyuban, maupun pihak otoritas taman. Keputusan ini diambil sebagai bentuk penghormatan terhadap prinsip etika penelitian Antropologi yang mengutamakan perlindungan identitas informan. Penyamaran nama dilakukan untuk melindungi privasi mereka dalam kapasitas pribadinya mengingat informasi yang mereka sampaikan dalam wawancara menggambarkan pengalaman dan pandangan pribadi mereka. Berikut pembagian tiga kategori informan:

Tabel 1. 1 Pembagian Jenis Informan Penelitian

Jenis	Orang	Fungsi dalam Penelitian
Informan Kunci	Sekretaris Paguyuban pedagang kaki lima Taman Seribu Lampu	Memberi gambaran besar tentang pedagang kaki lima dan memvalidasi informasi
Informan Utama	Pedagang kaki lima	Sumber data primer tentang strategi ekonomi dan pengalaman mereka berjualan di Taman Seribu Lampu
Informan Tambahan	Perwakilan Satpol PP	Perspektif dari sisi otoritas negara melengkapi dan mengkonfirmasi data dari sisi regulasi

Selanjutnya Pembagian informan kunci dan informan tambahan dalam penelitian yang dimana pihak-pihak inilah yang memiliki keterkaitan langsung

dengan sisi otoritas dan pengelolaan keberadaan pedagang kaki lima di Taman Seribu Lampu. Informan kunci penelitian ini adalah Pak Kawi yang merupakan sekretaris Paguyuban pedagang kaki lima Taman Seribu Lampu dan alasan peneliti tidak mewawancarai ketua Paguyubannya karena pada saat saya sedang menghubungi untuk melakukan wawancara dengan beliau, ternyata beliau dalam kondisi sakit dan tidak bisa melakukan wawancara, sehingga peneliti dialihkan untuk mewawancarai Pak Kawi yang pada saat itu bersedia melakukan wawancara.

Posisi Pak Kawi sebagai informan kunci penting dijelaskan bahwa beliau memiliki dualisme peran yang menjadikannya sumber data utama. Pertama, sebagai pedagang kaki lima yang aktif berjualan termasuk negosiasi ruang dengan pihak otoritas taman. Kedua sebagai sekretaris paguyuban, beliau memahami sistem internal organisasi, termasuk peraturan administrasi dan koordinasi antar anggota. Dualisme peran ini memungkinkan peneliti memperoleh perspektif yang berkaitan. Perspektif pak kawi sebagai pedagang digunakan untuk memahami pengalaman langsung sebagai pedagang dan perspektif pak kawi sebagai pengurus paguyuban pedagang kaki lima untuk memahami bagaimana paguyuban berperan dalam mendukung kepentingan bersama para pedagang kaki lima Taman Seribu Lampu. Adapun informan tambahan yakni selaku ketua Satpol PP Kecamatan Cepu yang memberikan perspektif dari sisi aparat negara yang berhadapan langsung dengan keberadaan pedagang kaki lima di Taman Seribu Lampu.

Tabel 1. 2 Pembagian Jenis Informan

No.	Nama	Pekerjaan
1	Warsito	Ketua Satpol PP Kecamatan Cepu
2	Acep	Anggota Satpol PP Kecamatan Cepu
3	Kawi	Sekretaris Paguyuban pedagang kaki lima Taman Seribu Lampu

Selanjutnya informan utama dalam penelitian ini terdiri dari keempat belas pedagang kaki lima yang aktif berjualan di area Taman Seribu Lampu dan mereka memiliki karakteristik yang berbeda dari jenis dagangan, lama berjualan, dan posisi lapak yang dengan sengaja dipertimbangkan untuk memastikan data yang diperoleh telah mewakili kompleksitas para pedagang kaki lima di taman secara menyeluruh.

Tabel 1. 3 Pembagian Informan Utama Penelitian

No.	Nama Samaran	Jenis Usaha	Usia Samaran
1	Jayen	Salome	40
2	Andro	Mie ayam bakso	45
3	Ihar	Bakso tetelan	60
4	Turi	Mainan	35
5	Bejo	Mainan	57
6	Salis	Pop Ice, kopi, dll	31
7	Marsi	Es kelapa	43
8	Sriatun	Cireng	50
9	Yuyu	Cireng	30
10	Nita	Pecel, rawon, dll	40
11	Desi	Pecel lele, ayam, dll	45
12	Ipin	Es Kelapa	65
13	Nisa	Opor setan dan penyetan	50
14	Kawi	Kopi, teh, minuman, dll	41

Sehingga penelitian ini melibatkan 16 orang informan yang terdiri dari satu informan kunci yakni pak kawi selaku sekretaris paguyuban dan pedagang kaki lima di Taman Seribu Lampu, 14 orang informan utama, dan 2 informan tambahan yang berjumlah 16 orang. Ketiga kategori informan diatas digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai strategi ekonomi, sosio spasial, dan relasi kuasa yang terjadi di Taman Seribu Lampu.

1.6.4 Pengumpulan data

Pada tahap pengumpulan data, peneliti menerapkan dua teknik guna menunjang metode kualitatif yang peneliti akan gunakan untuk memperkuat perolehan data penelitian. Pada penelitian kualitatif sendiri terbagi menjadi dua bagian; data primer dan data sekunder. Data primer yang dibutuhkan diperoleh melalui terjun lapangan dengan wawancara mendalam dan observasi partisipan. Sedangkan data sekunder merupakan penunjang informasi tambahan dan beberapa sumber literatur yang diperoleh dari artikel, jurnal, buku, berita, dan sumber ilmiah lainnya yang berkaitan dengan topik strategi ekonomi pedagang kaki lima. Metode pengumpulan data yang peneliti lakukan dalam penelitian ini antara lain:

a. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam merupakan proses menemukan informasi secara mendalam, terbuka, dan bebas dengan masalah dan fokus penelitian serta diarahkan pada pusat penelitian. Penggalan informasi ini dilakukan untuk mengetahui pendapat berdasarkan perspektif informan dalam memandang sebuah permasalahan (Hakim et al., 2025: 104). Penyusunan pertanyaan sudah peneliti rencanakan sebelumnya namun tidak terstruktur, dan peneliti akan menentukan pertanyaan kunci sebagai acuan wawancara. Melalui beberapa pertanyaan ini akan melahirkan beberapa pertanyaan *flexible* berdasarkan jawaban-jawaban yang dilontarkan informan agar sesi wawancara tidak terkesan kaku melainkan sebuah diskusi

b. Observasi

Observasi ini mengutamakan interaksi intens peneliti kepada subjek penelitian. Metode observasi dalam penelitian kualitatif melibatkan pendokumentasian dan mempelajari berbagai peristiwa yang terjadi dengan cara logis dan objektif sehingga peneliti sebagai pengamat menarik kesimpulan tentang suatu penelitian berdasarkan apa yang ia lihat dan dengar di lapangan. Observasi berfungsi untuk mendeskripsikan, melengkapi, dan menyediakan fakta yang dapat disamaratakan (Sari et al., 2025: 542). Observasi ini dilakukan untuk melihat langsung bagaimana aktivitas ekonomi informal dan sosial para pedagang kaki lima berlangsung di Taman Seribu lampu.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dari sumber dokumen dan rekaman. Dokumen bisa berbentuk gambar maupun tulisan yang menjadi data penyokong pada penelitian ini berdasarkan (Sari et al., 2025: 543). Data dokumentasi yang peneliti lakukan sesuai dengan ketentuan penelitian etnografi sebagai salah satu pendukung keabsahan data. Data dokumentasi nanti akan menjadi pelengkap untuk penelitian kualitatif.

1.6.5 Analisis Data

Analisis data penelitian kualitatif ini dilakukan dengan menerapkan model analisis data oleh Miles & Huberman (1994) yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu; reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

Pada tahap reduksi data dimaksudkan bahwa peneliti memilah data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi pada aspek-aspek yang relevan dengan rumusan masalah agar data yang tidak berkaitan dengan fokus penelitian dapat dipinggirkan agar analisis tetap terarah. Setelahnya, tahapan reduksi ini dilakukan secara terus menerus selama proses pengumpulan data, dengan cara membagi karakteristik data seperti; 1) bentuk strategi ekonomi 2) jejaring sosial antar pedagang kaki lima 3) bentuk negosiasi ruang yang muncul.

Semua data yang telah disaring akan dipelajari dan dianalisis lebih lanjut di tahap penyajian data yang mana pada tahap ini peneliti mengumpulkan data yang terpilih dalam bentuk kutipan wawancara, catatan lapangan, maupun tabel temuan lapangan, guna menampilkan hubungan antara kondisi sosial ekonomi pedagang kaki lima, dinamika ruang publik, dan strategi yang telah mereka lakukan. Sehingga untuk pada tahap penarikan kesimpulan peneliti melakukan interpretasi pada pola-pola yang muncul dari penyajian data tersebut dan mengaitkannya dengan argumentasi Keith Hart mengenai sektor informal sebagai ruang ekonomi yang berjalan paralel dengan sistem formal dan teori paguyuban/patembayan Ferdinand Tonnies mengenai karakteristik paguyuban Taman Seribu Lampu. Proses ini dilakukan lewat memverifikasi berulang dengan membandingkan data baru, catatan lapangan, dan hasil wawancara agar mendapatkan hasil yang didasarkan pola yang konsisten dan valid.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini telah disusun oleh peneliti berdasarkan pedoman penulisan skripsi yang berlaku sehingga dalam penyusunan laporan penelitian ini diharapkan tersusun secara sistematis, runtut, dan jelas dalam menyampaikan permasalahan yang diteliti. Adapun sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut:

- **Bab I: Pendahuluan**

Dalam bab ini dibahas mengenai latar belakang dari pemilihan topik, fenomena yang diteliti, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka untuk mengukur perbandingan dan keterbaruan terhadap penelitian lain, serta metodologi yang digunakan saat penelitian. Bab ini ini menjabarkan tentang arah dan fokus penelitian tentang strategi yang